

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Analysis Implementation Extension Program Of Capture Fisheries In Indragiri Hilir
Regency Riau Province

Miswanto¹⁾, Ridar Hendri²⁾, Kusai²⁾
miswanto.juara@yahoo.com

ABSTRACT

This study was conducted in January 2014 in Indragiri Hilir (Inhil), Riau Province. This study aims to determine how the implementation of fisheries extension program in the regency. The population in this study is the fisheries instructor in Inhil Regency totaling 21 people. The respondent are two fisheries instructors in Concong Village, District Concong, choised puspositive. Other data were taken from the informen, which consists of the Executive Agency officials Extension and Food Security (BP2KP) and the Department of Marine and Fisheries (DKP) Indragiri Hilir. The method used in this study is a survey method. While the analysis of the data using analysis of KPI (Key Performan Indicator). The results showed that the number of fisheries instructor are 21 people, the target is the group of fishermen, the extention system is visit, training and supervision (Lakusisi). While the extension method used is anjangsana, field schools, colloquium, workshop pulpit, open-field, business meeting, discussion opinions. Media used include extension of print media, television and radio. KPI analysis results of the implementation of fisheries extension only reaches 48%, which means less effective.

Keywords: Analysis, Implementation Program, Extension of Capture Fisheries

-
- 1) Student of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences
 - 2) Lecturer Faculty of Fisheries and Marine Sciences

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indragiri Hilir adalah salah satu Kabupaten yang memiliki potensi perikanan di Provinsi Riau. yang meliputi perikanan laut, budidaya air tawar, budidaya ikan laut, dan tambak udang potensi mencapai 43.192,18 ton (Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, 2012). Untuk mendukung pembangunan perikanan tangkap tersebut maka di Kabupaten tersebut melaksanakan penyuluhan perikanan tangkap.

Penyuluhan adalah sistem pendidikan non-formal yang ditujukan kepada sasaran untuk mengubah perilaku dan upaya pemberdayaan nelayan.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program penyuluhan adalah lembaga penyuluhan, jumlah dan mutu penyuluh, sasaran penyuluhan, perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian penyuluhan.

Instansi pemerintah yang terlibat dalam penyuluhan perikanan

tangkap adalah Badan Pelaksana Penyuluh Dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Meskipun demikian sejauh mana pelaksanaan Penyuluhan Perikanan tangkap dari Persiapan Pelaksanaan, Pelaksanaan, Metode, Media, Pengevaluasian maupun Hambatannya ini masih sangat sedikit diketahui maka peneliti merasa ingin meneliti penyuluhan perikanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2. Perumusan masalah

Walaupun penyuluhan perikanan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan perikanan bukan berarti dalam pelaksanaannya dan penyampaian program penyuluhan perikanan tidak ditemukan adanya kendala yang akan muncul di dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana gambaran:

1. Lembaga Penyuluhan, Karakteristik Penyuluh Perikanan Tangkap dan karakteristik sasaran penyuluhan (nelayan)?
2. Pelaksanaan program Penyuluhan Perikanan Tangkap (Persiapan Pelaksanaan Program, Pelaksanaan Program, Metode, Teknik, Media, Pengevaluasian)?
3. Prospek dan hambatan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Tangkap?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran:

1. Lembaga Penyuluhan Perikanan Tangkap, Karakteristik penyuluh perikanan dan karakteristik sasaran penyuluhan (nelayan).

2. Pelaksanaan program penyuluhan perikanan tangkap (Persiapan Pelaksanaan Program, Pelaksanaan, Metode, Teknik, Media, Pengevaluasian).
3. Prospek dan hambatan Penyuluh Perikanan Tangkap.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2014 berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah PPL perikanan yang bertugas di Kab. Inhil yang berjumlah 21 orang, sedangkan untuk responden diambil PPL perikanan yang bertugas di Desa Concong Luar yang berjumlah 2 orang, pengambilan secara *purposive*.

Untuk data-data informasi pendukung peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan dari pimpinan BP2KP danDKP. Informan nelayan adalah nelayan yang ada di Desa Concong Luar Kecamatan Concong 5 orang nelayan yang aktif mengikuti penyuluhan.

2.1. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif dan KPI (Key Performan Indicator). KPI digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program penyuluhan dengan rumus sebagai berikut.

$$KPI = \frac{Realita}{Target} \times 100\%$$

Standarisasi perhitungan target optimum = 80 – 100 % (Sangat Baik). Target minimum= 60 – 80 % (Baik). Target Terjelek = 50 – 60 % (Kurang Baik).

III. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir 18.812,97 Km², terdiri dari daratan seluas 11.605,97 Km²,

perairan umum 888,00 Km² dan laut 6.318 Km².

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir (2011) berjumlah 658.178. Sebagian besar penduduk, 588.098 jiwa (89,35%) berdomosili di pedesaan. Penduduk yang bermata pencaharian di sektor agro 74 %.

Prasarana BP2KP yang terdapat di Kabupaten terdapat 14 BP2KP, dari segi bangunan UPT Badan yang ada Kabupaten sudah terdapat 57% unit bangunan.

Sarana transportasi penyuluhan untuk transportasi darat berupa sepeda motor sebanyak 181 dan layak pakai 38,7% dan transportasi air 1 unit kapal. Sarana lembaga keuangan, yang meliputi Bank BNI, BRI, Bank Riau, Danamon, Panin, BPR, Mega, Mandiri Syariah dan BCA Cabang Tembilahan sedangkan Lembaga keuangan bukan Bank adalah penggadaian dan perusahaan Asuransi, Lembaga Koperasi.

3.1.Potensi Ketahanan Pangan

Potensi ketahanan pangan di daerah Kabupaten: Potensi lahan sawah pasang surut seluas 46.360 hektar. Perkebunan luas areal adalah 1.565.666 ha

Potensi perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Dan Peluang Investasi Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013.

No	Jenis Usaha	Potensi		Peluang
		Nilai	Satuan	Investasi
1	Penangkapan di Perairan Laut Budidaya Air	109.212	Ton	63,3
2	Payau (tambak) Budidaya Air	88.480	Ton	93,9
3	Tawar (Mina Tani)	578,55	Ton	82,11
4	Budidaya Laut (KJA)	46.000	Ton	100

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 1 memperlihatkan bahwa potensi perikanan dari 578,55 ton sampai dengan 109.212 ton, sedangkan untuk peluang investasi masih mempunyai peluang dari 63% sampai dengan 100%. Dimana dari 21 kecamatan yang menghasilkan perikanan tangkap terdapat 10 kecamatan (50%) dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten menghasilkan perikanan tangkap. Kecamatan yang menghasilkan perikanan tangkap ini adalah kecamatan Kuindra 60.010,62 ton, Tanah Merah 10.613,03 ton, Reteh 2.374,14 ton, Mandah 6.286,04 ton, Kateman 3.080,86 Ton, Pulau Burung 700,69 ton, Gas 198,73 ton, Gaung 193,64 ton, Concong 7.694,77 ton dan Sungai Batang 2.997,61 ton.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Lembaga Penyuluhan Perikanan Tangkap

Instansi pemerintah yang mengikuti penyuluhan yakni DKP dan BP2KP, sejarah didirikannya DKP dan BP2KP sama-sama disahkan oleh Bupati tanggal 15 November 2006 dan Stakeholder. DKP sesuai dengan keputusan Bupati tanggal 27 Desember 2004.

Peran dan fungsi kerja BP2KP sebagai pelaksana penyuluhan hal ini dikarenakan semua pelaksana penyuluhan dilakukan oleh BP2KP mulai dari penyusunan sampai dengan pengevaluasian. DKP hanya memberikan informasi program, memberi insentif kepada penyuluh apabila anggaran tersedia.

4.2.Karakteristik Penyuluh

Penyuluh Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai sub sektor bidang keahlian yaitu: Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kelautan dan Perikanan perternakan dan keahlian Penyuluhan Kehutanan belum ada.

Hampir seluruh penyuluh PNS dan CPNS. Tenaga Honorer dan THL-TBP. Sedangkan penyuluh swadaya yang direkrut dari kontaktani baru 6 orang.

Penyuluh yang bertugas di kabupaten berjumlah 198 orang penyuluh. Dimana jumlah penyuluh dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pendidikan yang terbanyak adalah DIII sebanyak 96 orang penyuluh dan diikuti S-1/ D-IV 54 orang dan tingkat SLTA 48 orang.

Sedangkan untuk penyuluh perikanan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Pendidikan Penyuluh Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2013

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	Porposisi %	Jumlah	Porposisi %
SPP-SUPM	6	100%	0	0%
D3	2	40%	3	60%
Sarjana Perikanan	6	60%	4	40%
Jumlah	14		7	

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Indragiri Hilir

Tabel 4. memperlihatkan penyuluh perikanan berjumlah 21 orang berasal dari DKP, berjenis kelamin laki- laki 14 orang (67%) untuk tingkat pendidikan penyuluh perikanan yang berpendidikan SPP-SUPM 100%, D3 40% Sarjana Perikanan 60% untuk berjenis kelamin perempuan 7 orang (33%) untuk tingkat pendidikan SPP-SUPM 0%, D3 60% dan S1 Perikanan 40%. 3 orang penyuluh KJF dengan golongan Pembina (IV/a) dan CPNS (III/a) dan bertugas di BP2KP.

Dari penyuluh perikanan yang berjumlah 21 orang ini WKPP berada di 17 kecamatan. untuk setatus

kepegawaian penyuluh tersebut sudah menjadi PNS.

Gracia (2005) menyebutkan bahwa untuk melatih ibu-ibu nelayan diperlukan tenaga penyuluh yang berjenis kelamin yang sama agar sistem penyuluhan lebih efektif.

4.3. Karakteristik Sasaran

Tabel 4. Tingkat Keaktifan KUB Nelayan Mengikuti Penyuluhan di Desa Concong Luar Kecamatan Concong Tahun 2013.

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Tingkat Kehadiran	
			Frekuensi	Persentase
1	Sumber Rezeki	10	8	25.0
2	Udang Kipas	10	7	21.8
3	Kakap	10	5	15.6
4	Kurau	13	7	21.8
5	Bina Usaha	9	5	15.6
Jumlah		52	32	100
Rata-rata		10.4	6.4	

Sumber: UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan Kecamatan Concong

Tabel 4 memperlihatkan rata-rata jumlah KUB 10 orang anggota perkelompok sedangkan untuk tingkat kehadiran anggota 15-25,6% dengan rata- rata 19,9% pada tahun 2013. Rasio yang dianjurkan oleh pusat pengembangan penyuluhan antara jumlah penyuluh dan pelaku utama yang dilayani adalah 1 penyuluh berbanding 10-15 kelompok (Djari 2009).

4.4. Program Pelaksanaan Penyuluhan

Adapun program penyuluhan perikanan tangkap dapat dilihat tabel 5.

Tabel 5. Program Penyuluhan Perikanan di Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013.

No	Program/ Kegiatan	Jenis Bantuan	Lokasi
1	Program pengembangan perikanan tangkap	Pengadaan sarana dan perasarana penangkapan	
	1. kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan	✓ Kapal Motor 5 GT dan mesin ✓ Jaring	Desa Concong Luar
	2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (pump) Tangkap	✓ Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi nelayan	
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
	1. Pengembangan Usaha Mina pedesaan	✓ Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi pengolah dan pemasaran ✓ Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi pengolah dan pemasar	Poklamsar Pengolahan Ikan Asin Desa Concong Luar Poklamsar Pengolahan Ikan Asin Desa Concong Luar

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.7 memperlihatkan bahwa program pembangunan perikanan tangkap tertuju pada pengembangan dan peningkatan produksi dan usaha mina pedesaan berupa bantuan kapal motor 5 GT dan mesin dan 15 piece jaring adapun program PUMP sasaran adalah KUB Kakap, KUB Sumber Rezeki serta KUB Kipas dan untuk pengoptimalisasi pengolahan serta pemasaran produksi perikanan melalui rogram PUMP melalui jenis bantuan berupa BLM, lokasi sasaran poklamsar yaitu pengolahan ikan asin dan belacan yaitu KUB Bina Usaha dan KUB Kurau yang ada di Desa Concong Luar.

4.5. Persiapan Pelaksana Penyuluhan

a. Penyusunan Program Kabupaten

1. Rapat koordinasi penyusunan kabupaten dengan peserta stakeholder tingkat kabupaten,
2. Pengumpulan dan pengolahan data, termasuk data dan informasi dari satuan kerja tingkat provinsi.
3. Penyusunan yang langsung dilakukan BP2KP.
4. Pengesahan program penyuluhan kabupaten oleh Kepala BP2KP.

b. Penyusunan Program Kecamatan (UPT)

1. Rapat koordinasi penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan dengan peserta stakeholder wilayah UPT.
2. Pengumpulan dan pengolahan data, termasuk data dan iformasi dari satuan kerja tingkat propinsi.
3. Penyusunan, pengetikan dan pengeditan naskah.
4. Pengesahan program penyuluhan UPT oleh Kepala UPT BP2KP bersangkutan.

c. Penyusunan Program Penyuluhan Desa

Program Penyuluhan Desa/ unit kerja lapangan disusun oleh penyuluh lapangan di wilayah kerja:

Tahapan penyusunan program penyuluhan desa sebagai berikut

1. Penyusunan rancangan program penyuluhan Desa.
2. Pertemuan penyusunan program penyuluhan oleh penyuluh lapangan dan sebagai peserta adalah anggota KTNA tingkat Desa para, pelaku usaha perikanan serta dihadiri oleh Lurah.
3. Pengumpulan materi masukan dari informasi kegiatan penyuluhan kecamatan yang

- lokasi pelaksanaannya di Desa/ Kelurahan.
4. Menyempurnakan Programa.
 5. Penandatanganan oleh penyuluh lapangan di ketahui oleh Lurah/ Kepala Desa.

4.6. Pelaksanaan penyuluhan

Penyampaian program penyuluhan secara umum dan pada forum yang formal dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Uraian Kerja Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir secara Formal

No	Uraian Kerja	Waktu yang dibutuhkan (menit)	Terealisasi (menit)	Persentase
1	Pendahuluan	10	10	100
2	Menjelaskan materi penyuluhan perikanan	80	70	114
3	Membimbing Praktik	250	250	100
4	Pengakhiran	20	20	100
	Jumlah	360	350	414
	Rata- Rata		87.5	103.5

Sumber: Penyuluh Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 6 memperlihatkan bahwa kerja penyuluh dalam menyampaikan program baik persentase mencapai 103.5% dimana waktu yang telah ditargetkan tercapai dengan penguraian kerja penyuluhan perikanan meliputi pendahuluan yaitu fasilitator menyampaikan pengantar diklat (Menyampaikan tujuan pembelajaran penyuluhan). Menjelaskan materi penyuluhan perikanan (Pengertian, Tujuan Dan prinsip materi memberi kesempatan jawaban kepada peserta bila bertanya). Membimbing Praktik

(Peserta membagi menjadi kelompok kecil 6 orang/ kelompok, mendiskusikan dan menuliskan hasil kerja dalam kertas, mempresentasikan hasil kerjanya untuk ditanggapi kelompok lain), Pengakhiran (Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi/ presentase kelompok).

4.7. Tempat Pelaksanaan

a. Kelompok Tani dan Kontak Tani

Kelompok tani yang dijadikan tempat penyuluhan Tahun 2013 berjumlah 1.404 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Keadaan Kelompok dan Kelas Kelompoktani di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012.

No	Klasifikasi	Jumlah/ Kelompok	Persentase
1	Pemula	1057	75.28
2	Lanjut	275	19.58
3	Madya	69	4.91
4	Utama	3	0.21
	Total	1404	100

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BP2KP)

Tabel 7 memperlihatkan kelompok pemula yang mendominasi KUB kelas pemula mencapai 75% dan utama hanya 0.21%. Dimana

kelompok untuk penyuluhan perikanan tangkap berjumlah 499 kelompok dibidang usaha perikanan/ nelayan (32%) dari seluruh

kelompoktani yang ada di Kabupaten. Sedangkan untuk KTNA yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir priode 2011-2015 berjumlah 33 KTNA

b. Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)

Tiga buah KKA di lokasi pengembangan kawasan agropolitan sejak tahun 2005 yaitu Balai Penyuluhan Tembilahan, Sungai Salak dan Kempas Jaya. Akan tetapi belum berjalan sebagaimana yang di harapkan karena minimnya fasilitas dan dukungan anggaran serta antusias masyarakat yang kurang.

Akan tetapi pemerintah membenahi untuk revitalisasi sebagai berikut:

1. Pendataan ulang tim konsultasi untuk pengaturan jadwal jaga KKA.
2. Disosialisasikan mengenai keberadaan KKA yang melayani tentang agribisnis apapun.
3. KKA dibuka melayani informasi kepada masyarakat nelayan/ tani pada tiap hari senin sampai denagan kamis, pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.WIB, hari jumat pukul 09.00 – 11.00 WIB.
4. Secara bertahap melengkapi fasilitas KKA yang dibutuhkan.

4.8. Jadwal Kunjungan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kunjungan penyuluhan perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir sangat minim hanya 27% yang berarti kurang baik, Hal ini disebabkan banyak faktor seperti dana, sarana prasarana, transportasi dan sulitnya mengumpulkan para nelayan.

Didalam pengumpulan anggota nelayan pada kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Concong untuk melakukan penyuluhan hanya mencapai 33% hal ini dikarenakan sulitnya nelayan untuk menerima

hal-hal baru dan teknologi, kehadiran kunjungan persentasinya lumayan besar yakni pada musim angin utara. Karena pada musim ini banyak nelayan yang tidak melaut karena gelombang tinggi.

4.9. Pendekatan Sistem Lakususi

Dalam pelaksanaan penyuluhan dengan pendekatan sisitem lakusisi, penyuluhan berkerja secara polivalen. Dalam penerapka pendekatan sistem kerja lakususi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pertemuan koordinasi dan konsultasi kepala UPT BP2KP Kecamatan se Kabupaten. dilaksanakan setiap awal bulan sesuai denagan jadwal yang telah di tetapkan, dipimpin oleh Kapala BP2KP.
2. Pertemuan/ pelatihan penyuluhan lapangan di Balai Penyuluhan/ UPT Badan kecamatan sebulan sekali dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BP2KP.
3. Kunjungan penyuluhan lapangan ke kelompoktani/kelompok usaha perikanan.
4. Supervisi pelaksanaan penyuluhan di lapangan:
 - Dari Kabupaten ke Balai Penyuluhan/ UPT Badan kecamatan atau langsung ke Desa/ Kelurahan, kelompoktani-nelayan/ kelomopk usaha dan ke lahan usaha nelayan atau tempatusaha.

Petugas supervisor adalah penyuluh anggota KJF Penyuluh Kabupaten atau Kecamatan dan pejabat lainnya yang ditetapkan oleh BP2KP.

4.10. Persiapan Dan Penyebaran Materi Penyuluhan

Langkah-langkah kegiatan peyebarluasan informasi sebagai berikut:

1. Perhimpunan materi informasi yang sudah dikemas siap edar dari sumber lembaga lain yang berhubungan dengan perikanan.
2. Pengadaan dan pengolahan perpustakaan BP2KP, yang meliputi penyiapan ruangan untuk perpustakaan dan fasilitas pustaka dan berkerjasama dengan pusataka lainnya.
3. BP2KP memproduksi sendiri materi informasi sebagai berikut: survey, penyusunan, proses produksi, penyebarluasan materi informasi.

4.11. Transfer Teknologi

Pangkal sumber teknologi adalah lembaga penelitian dan pengembangan perikanan tangkap, sumber pangkal teknologi adalah di Balai Penelitian Perikanan dan untuk tingkat Provinsi namanya BPTP. Secara analog pengujian teknologi mulai dari skala kecil, semakin besar dan akhirnya anjuran secara luas.

4.12. Metode Penyuluhan

1. **Anjangsono** atau kunjungan merupakan kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan secara langsung kepada sasaran.
2. **Sekolah Lapangan** adalah pada kelompok KUB, kelompok tani-nelayan dilapangan bersama Pemandu Lapangan (PL).
3. **Temu Wicara** Pertemuan dan dialog dua arah antara petani atau kontak-tani dengan pejabat pemerintah.
4. **Mimbar Sarasehan** merupakan forum konsultasi antara wakil para petani/ KTNA dengan pihak pemerintah hal-hal yang menyangkut masalah-masalah pelaksanaan program.
5. **Temu Lapang** Penyelenggaranya adalah petugas penyuluhan perikanan, para peneliti atau

petugas lain bahkan juga petani yang ditunjuk oleh instansi.

6. **Temu Bisnis** adalah pertemuan antara petani atau kontak tani dengan para pengusaha, baik pengusaha Agroindustri di segmen hulu dan hilir
7. **Urun Pendapat** Penyuluh ini biasanya dilakukan pada kelompok tani-nelayan.

4.13. Teknik Pendekatan

a. Teknik Pendekatan Perorangan:

1. **Kunjungan rumah** kerumah ini biasanya dilakukan oleh penyuluh maupun sasaran dimana kunjungan ini dilakukan sesuai dengan kondisi nelayan dimana penyuluh akan melihat waktu yang senggang buat melakukan penyampaian materi.

2. **Hubungan Telepon** Hubungan telepon ini biasanya dilakukan oleh penyuluh perikanan maupun sasaran guna untuk membicarakan hal-hal yang kurang jelas.

- b. **Teknik Pendekatan Kelompok** seperti diskusi kelompok, temu-temu antara penyuluh dan dan sasaran baik dari pelaku utama maupun usaha dan teknik ceramah

- c. **Teknik Pendekatan Massal** melalui Pemasangan Poster/ Sepanduk, Siaran Pedesaan (Radio), Penyebaran bahan bacaan dan Pemutaraan Tv Daerah dan film.

4.14. Publikasian Penyampaian Program Penyuluhan:

a. Media Cetak

1. **Surat kabar/ Koran** adalah media cetak yang memuat informasi umum, berukuran plano atau broadsheet (75 cm x 114 cm).
2. **Poster.** Poster-poster yang diterbitkan oleh BP2KP, dan poster yang diterbitkan BP2KP

mengkilat. disain tampilan, tataletak foto dan huruf menarik, tapi sebagian lagi tidak.

3. **Buklet.** Buklet atau buku saku yang digunakan dalam penyuluhan Perikanan Tangkap didapatkan dari tingkat propinsi dan ada pula dibuat sendiri oleh BP2KP.
4. **Selebaran.** Selebaran ini di buat oleh BP2KP maupun yang berasal dari tingkat propinsi. Untuk media cetak yang telah disampaikan penyuluh di Desa Concong Luar penyampaian program melalui media cetak mencapai 62,75% yang baerarti dalam penyampaina materi melalui media cetak baik.

b. Media Elektronik

1. **Radio** yang menyiarkan materi penyuluhan perikanan adalah radio lokal yakni Gemilang Fm.
2. **Televisi local** materi informasi perikanan yang ditayangkan instansi di stasiun televisi daerah yaitu TV Srigemilang.
3. **Video** diproduksi oleh BP2KP yang digunakan pada saat melakukan pelatihan kelompoktani yang di adakan ditingkat kecamatan atau kabupaten.
4. **Hand Phone** digunakan untuk informasi yang belum jelas tentang perikanan baik dari pihak penyuluh maupun nelayan lama durasi sesuai dengan kebutuhan.

4.15. Pemantauan Dan Pengevaluasian.

Evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tangkap tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ kelurahan Pemantuan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan evaluasi dilakukan

setiap pada akhir tahun anggaran. Sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi programa penyuluhan di setiap wilayah.

4.16. Dana Pelaksana

Dana yaitu:

- a. APBD Kabupaten Indragiri Hilir
- b. APBD Propinsi Riau
- c. APBN
- d. Swadaya Masyarakat Petani

4.17. Prospek Dan Hambatan Prospek

a. Prospek

Potensi perikanan tangkap 50% Kecamatan yang ada di Kab. Inhil dan hanya beberpa persen dari potensi yang ada termanfaatkan maka sangat perlu diperhatikan pembangunan di bidang sektor penangkapan oleh sebab itu sangat dibutuhkan adanya Penyuluhan Perikanan.

b. Hambatan

1. Hambatan Umum

- a. Kelembagaan kelompoktani-nelayan belum mantap dan tertata baik.
- b. Tingkat professional penyuluhan perikanan tangkap belum memadai.
- c. Tuntutan informasi teknologi dan agribisnis semakin luas dan beragam.
- d. Rendahnya jual produk-produk perikanan dan harga sarana produksi tinggi, mengakibatkan gairah untuk berusaha bidang perikanan melemah.
- e. Tingkat kehadiran nelayan rendah.

2. Hambatan Khusus

- a. Belum terintegritas dengan baik antara kegiatan penyuluhan dengan kegiatan pembangunan perikanan.
- b. Kurangnya acuan rencana tiap Tahun.

- c. Kurangnya Penyusun jadwal pertemuan kepala UPT BP2KP di kabupaten dan pelatihan PPL di BPP/ UPT BP2KP setiap tahun.
- d. Pelaksanaan operasional di lapangan tidak selalu sama dengan rencana sehingga sulitnya dalam pengawasan pelaksanaan dan pengevaluasian.
- e. Keadaan lembaga kelompok tani-perlu pemantapan.
- f. Publikasi kegiatan Penyuluhan masih sangat minim.
- g. Perpustakaan BP2KP belum tertata dengan baik.

4.18. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga yang melakukan penyuluhan perikanan tangkap adalah BP2KP dan DKP, Karakteristik penyuluh perikanan di berjumlah 21 orang penyuluh perikanan dan berpendidikan tamatan SLTA, D3, Sarjana, penyuluh berkerja secara *polivalen*, sasaran kelompok- nelayan yang ada di kecamatan concong dari 13 kelompok yang aktif 5 kelompok. Pelaksanaan Penyuluhan dengan menggunakan pendekatan lakususi dari kabupaten, kecamatan UPT ke desa atau ke kelompok tani-nelayan, Pengevaluasian pelaksanaan.

Metode Anjarsana, Sekolah Lapangan, Temu Wicara, Mimbar Sarasehan, Temu Lapang, Temu Bisnis, Urun Pendapat. Teknik Pendekatan Perorangan, Kelompok, Massal. media cetak dan Media Elektronik. Pemantuan dilakukan sepanjang tahun, sedanagakan evaluasi dilakukan setiap pada akhir tahun anggaran.

Prospek kedepan penyuluhan sangat dibutuhkan karena hampir 50 persen kecamatan mempunyai

potensi perikanan tangkap. Dari analisa dengan menggunakan KPI hanya mencapai 48% yang berarti penyuluhan perikanan tangkap kurang efektif.

b. Saran

Lembaga yang melakukan penyuluh agar berkoordinasi dengan baik. Sistem kerja penyuluh secara polivalen sehingga kurang efektif. pelaksanaan peran media sangat dibutuhkan supaya lebih efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Djari, A. A. 2009. Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan Era Desentralisasi di Indonesia. Desertasi. tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana IPB.
- Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, 2012.
- Garcia, SM. And K.L. Cochrane. 2005. *Ecosystem Approach to Fisheries: a Review of Implementation Guidelines*. *ICES Journal of Marine Science* 62:311-318.
- http://eprints.undip.ac.id/35659/1/Skr_ripsi_SITI.pdf diakses pada tanggal 14 Mei 2014 [01.05 WIB].